

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA

Oleh:

Putri Intan Prastiwi<sup>1</sup>

Esa Virginia Ririanti<sup>2</sup>

Deswita Puspa Lestari<sup>3</sup>

Eva Nur Aisah<sup>4</sup>

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Sekaran, Kec Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Korespondensi Penulis: [intanpratiwiputri374@students.unnes.ac.id](mailto:intanpratiwiputri374@students.unnes.ac.id),  
[virginiaesa22@students.unnes.ac.id](mailto:virginiaesa22@students.unnes.ac.id), [deswitapuspa01@students.unnes.ac.id](mailto:deswitapuspa01@students.unnes.ac.id),  
[evaaisah@students.unnes.ac.id](mailto:evaaisah@students.unnes.ac.id).

**Abstract.** *This study aims to describe and analyze the implementation of financial management in supporting educational operational activities at SMP IT Insan Cendekia. The research focuses on budget planning through ARKAS, the management of BOS funds and additional financial resources, accountability mechanisms, and the evaluation of effectiveness and compliance with the School Budget Plan (RAB). A qualitative approach with an intrinsic case study design was used, involving in-depth interviews with the school principal, treasurer, and administrative staff. The findings reveal that financial management is implemented collaboratively, accountably, and supported by a digital system. The ARKAS platform facilitates efficient and transparent budget planning. BOS funds are allocated for essential routine needs, while supplementary funds from tuition fees, re-registration, and foundations support non-routine programs. Financial accountability is maintained through a non-cash transaction system and regular financial reporting. Despite the benefits of digitalization, challenges remain, such as data discrepancies, limited BOS funds, and inadequate training for human resources. This*

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA

*study recommends the development of streamlined standard operating procedures (SOP) and regular staff training to strengthen sustainable financial governance in schools.*

**Keywords:** *Accountability, ARKAS, BOS Funds, Financial Management, School Operations.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMP IT Insan Cendekia dalam mendukung kegiatan operasional sekolah. Fokus penelitian meliputi perencanaan anggaran melalui ARKAS, pengelolaan dana BOS dan dana tambahan, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, serta evaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara, dan staf tata usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan dilakukan secara kolaboratif, akuntabel, dan berbasis digital. Sistem ARKAS membantu sekolah dalam menyusun RKAS secara efisien dan transparan. Dana BOS digunakan untuk kebutuhan rutin, sementara dana tambahan dari SPP, registrasi ulang, dan yayasan dimanfaatkan untuk mendukung program non-rutin. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara nontunai dan diawasi melalui pelaporan berkala. Meskipun sistem digital meningkatkan efisiensi, masih terdapat tantangan seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan dana, dan kurangnya pelatihan SDM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP keuangan dan pelatihan rutin untuk mendukung tata kelola keuangan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, ARKAS, Dana BOS, Manajemen Pembiayaan, Operasional Pendidikan.

## LATAR BELAKANG

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung kelangsungan operasional dan peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah (Banding, 2024). Kegiatan pendidikan membutuhkan perencanaan anggaran yang sistematis dan terukur agar pemanfaatan sumber daya keuangan menjadi efisien (Sianturi et al., 2024). Dalam hal ini, manajemen pembiayaan yang baik tidak hanya berfokus pada pemasukan, tetapi juga bagaimana dana tersebut direncanakan,

dibelanjakan, serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Hidayat & Fadhilah, 2024). Perencanaan keuangan yang kurang matang dapat berdampak pada terhambatnya kegiatan pembelajaran di sekolah (Syukri et al., 2024).

Banyak sekolah swasta di Indonesia saat ini mengalami tekanan operasional akibat ketergantungan pada dana BOS yang terbatas, sehingga jika dana BOS juga harus digunakan untuk program tambahan seperti makan siang, sebagian bahkan khawatir akan “gulung tikar” karena dana tersebut sudah sangat menipis (Ubaid Matraji/JPPi, 2024). Meskipun sistem ARKAS dirancang untuk mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan transparansi, terkait hambatan teknis dan masih rendahnya literasi digital di sejumlah sekolah menyebabkan implementasinya belum optimal (Trisna Wulandari, 2023). Selain itu, kasus penyelewengan dana BOS yang masih marak muncul menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas di sekolah belum cukup kuat (Kemendikdasmen, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penganggaran modern dan terintegrasi seperti ARKAS.

ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah sistem digital yang dikembangkan oleh Kemendikbud untuk mempermudah perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah (Prihanarko & Hidayati, 2023). Dengan ARKAS, sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terstruktur dan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) (Attaqi, 2024). Aplikasi ini juga membantu dalam menghindari duplikasi anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja operasional (Tenri, 2025). Implementasi ARKAS di sekolah telah terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Miharja, 2025). SMP IT Insan Cendekia sebagai sekolah swasta berbasis Islam juga mulai mengadopsi ARKAS untuk menunjang efisiensi tata kelola anggaran.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah sumber pembiayaan utama dalam kegiatan operasional pendidikan di Indonesia, termasuk untuk membiayai kebutuhan non-personalia (Mustabsyirah & Mardyawati, 2024). Pengelolaan dana BOS membutuhkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan juknis (Setiawan & Miharja, 2025). Setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan harus dicatat dan disesuaikan dengan ketentuan ARKAS untuk menghindari penyimpangan (Maknun & Fatin, 2025). Penyaluran dan penggunaan dana BOS yang tepat sasaran akan sangat menentukan kualitas layanan pendidikan yang diberikan

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

sekolah (Banding, 2024). Dalam praktiknya, sekolah menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan pemahaman juknis.

Namun, karena keterbatasan jumlah dana BOS yang tidak mampu menutup seluruh kebutuhan, banyak sekolah seperti SMP IT Insan Cendekia menggali sumber dana tambahan (Anggina & Kurniati, 2024). Dana tambahan tersebut dapat berasal dari donatur, sumbangan sukarela wali murid, hingga kegiatan produktif sekolah (Yudianto et al., 2023). Sumber dana ini sangat penting untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan sarana prasarana, dan pengembangan mutu guru (Lowongan et al., 2024). Pengelolaan dana tambahan ini pun harus melalui prosedur yang transparan dan tercatat agar tidak menimbulkan konflik (Mustabsyirah & Mardyawati, 2024). Ketidaktertiban dalam mengelola dana tambahan berpotensi menyebabkan penyimpangan anggaran.

Dalam konteks SMP IT Insan Cendekia, penerapan ARKAS dan tata kelola pembiayaan pendidikan berbasis akuntabilitas menjadi upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sekolah (Miharja, 2025). Sekolah ini berusaha mengadopsi prinsip-prinsip profesional dalam pembiayaan agar seluruh program berjalan optimal dan berkelanjutan (Maknun & Fatin, 2025). Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknis dan SDM, transformasi digital telah membawa dampak positif bagi kinerja manajerial sekolah (Waluyo, 2023). Dengan melakukan evaluasi berkala dan melibatkan pemangku kepentingan, sekolah dapat mempertahankan akuntabilitasnya (Setiawan & Miharja, 2025). Ini menjadi model manajemen yang layak untuk direplikasi di sekolah lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fadhilah (2024) menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui sistem ARKAS telah memberikan dampak positif terhadap perencanaan dan pelaporan anggaran. Namun, studi tersebut belum secara menyeluruh mengintegrasikan evaluasi terhadap kendala pelaksanaan khususnya di sekolah berbasis Islam. Sementara itu, Syukri et al. (2024) menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap RAB dalam menjaga akuntabilitas keuangan sekolah, tetapi belum mengeksplorasi hubungan antara mekanisme transaksi digital dan efektivitas pelaporan. Penelitian oleh Prihanarko dan Hidayati (2023) berfokus pada efektivitas ARKAS dalam pengelolaan dana BOS, namun terbatas pada konteks sekolah negeri dan belum menyentuh dinamika di sekolah swasta. Di sisi lain, studi Tenri (2025) menekankan pentingnya keberadaan dana tambahan di sekolah, tetapi tidak membahas

secara mendalam mekanisme pemanfaatannya dalam mendukung keberlanjutan program operasional pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah dalam literatur terkait implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah Islam terpadu yang mengkaji secara komprehensif seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pengelolaan dana BOS, dana tambahan, pertanggungjawaban keuangan, hingga evaluasi dan kepatuhan terhadap RAB dalam satu kesatuan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMP IT Insan Cendekia dalam mendukung kegiatan operasional pendidikan. Fokus utama penelitian mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan dana BOS dan sumber dana tambahan, mekanisme pertanggungjawaban keuangan berbasis ARKAS, serta evaluasi terhadap efektivitas dan kepatuhan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diterapkan sekolah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan transparan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Akuntabilitas Publik**

Teori akuntabilitas publik berakar dari gagasan Dwight Waldo (1952), yang menekankan bahwa dalam administrasi publik, setiap tindakan birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan legal kepada masyarakat. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Behn (2001) yang mengidentifikasi tiga fungsi utama akuntabilitas: *accountability for finances* (akuntabilitas keuangan), *accountability for fairness* (keadilan dalam pelayanan), dan *accountability for performance* (hasil kerja yang dicapai). Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas publik berarti sekolah sebagai penerima dana publik wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana secara terbuka dan sesuai regulasi (Setiawan & Miharja, 2025). Hal ini mencakup kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pencatatan dan pelaporan keuangan yang terdokumentasi melalui sistem seperti ARKAS (Attaqi, 2024).

Menurut Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas publik memiliki empat bentuk: *bureaucratic*, *legal*, *professional*, dan *political*. Keempatnya relevan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, di mana kepala sekolah tidak hanya bertanggung

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat, guru, dan wali murid (Waluyo, 2023). Praktik akuntabilitas yang baik akan membangun kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi lembaga pendidikan (Mustabsyirah & Mardyawati, 2024). Oleh karena itu, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari etika tata kelola pendidikan yang baik dan berkelanjutan (Prihanarko & Hidayati, 2023).

### **Manajemen Pembiayaan**

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengalokasikan, menggunakan, dan mengendalikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sianturi et al., 2024). Manajemen ini mencakup kegiatan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja pendidikan, serta evaluasi pemanfaatan anggaran terhadap capaian mutu pendidikan (Banding, 2024). Prinsip utama dalam pembiayaan pendidikan adalah efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, yang semuanya perlu didukung oleh sistem informasi yang baik seperti ARKAS (Tenri, 2025).

Dana BOS, sebagai salah satu bentuk pembiayaan pendidikan dari pemerintah, dikelola dengan tujuan mendukung biaya operasional sekolah agar siswa memperoleh pendidikan secara gratis dan berkualitas (Maknun & Fatin, 2025). Namun, mengingat keterbatasan dana BOS, sekolah juga perlu menggali sumber pendanaan tambahan secara kreatif dan legal, termasuk dari masyarakat dan mitra (Anggina & Kurniati, 2024). Oleh karena itu, kepala sekolah, bendahara, dan tim manajemen keuangan harus memiliki kompetensi dalam merancang dan mengelola pembiayaan agar program pendidikan berjalan lancar dan berkelanjutan (Yudianto et al., 2023).

### **Kegiatan Operasional**

Kegiatan operasional sekolah mencakup semua aktivitas rutin yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran dan layanan administrasi pendidikan (Hidayat & Fadhilah, 2024). Operasional tersebut antara lain meliputi pengadaan sarana prasarana, pembayaran utilitas, pengembangan profesionalisme guru, penyediaan bahan ajar, serta pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler (Larasanti & Wicaksono, 2025). Semua kegiatan ini membutuhkan dukungan dana yang memadai dan manajemen keuangan yang efektif.

Keberhasilan operasional sekolah sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang realistis dan sesuai kebutuhan, serta pelaksanaan yang disiplin terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Setiawan & Miharja, 2025). ARKAS sebagai sistem pendukung, memungkinkan sekolah menyusun rencana operasional yang terintegrasi dengan pembiayaan, sekaligus mempermudah proses pelaporan dan evaluasi (Miharja, 2025). Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional juga penting dilakukan secara periodik untuk mengetahui efektivitas belanja dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pendidikan (Mustabsyirah & Mardyawati, 2024).

Sekolah yang mampu mengelola kegiatan operasionalnya dengan efisien akan menunjukkan performa pendidikan yang lebih baik, termasuk dalam pencapaian hasil belajar siswa, kepuasan guru, dan kepercayaan orang tua (Syukri et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menjadikan manajemen pembiayaan sebagai bagian integral dari perencanaan strategis institusi pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk memahami secara mendalam implementasi manajemen pembiayaan di SMP IT Insan Cendekia. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling melibatkan Bendahara Sekolah, Kepala sekolah dan staff TU. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang menggali informasi mengenai proses perencanaan anggaran, sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan dana, sistem pelaporan, tantangan, dan dampaknya terhadap kegiatan operasional pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan tidak hanya mencakup proses perencanaan dan penggunaan dana, tetapi juga mencakup pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas atas semua transaksi keuangan yang terjadi. Dalam konteks SMP IT Insan Cendekia, implementasi manajemen pembiayaan memiliki sistem yang terstruktur dan berbasis digital, disesuaikan dengan regulasi pemerintah dan kebutuhan operasional sekolah swasta. Wawancara mendalam dengan bendahara sekolah dan kepala sekolah

# **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

mengungkap berbagai aspek penting dalam pengelolaan dana yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi.

## **Penyusunan Rencana dan Penganggaran melalui ARKAS**

Proses penyusunan rencana dan penganggaran merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di SMP IT Insan Cendekia. Penyusunan ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan melalui aplikasi digital berbasis pemerintah, yaitu Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Setiap akhir tahun, tepatnya sekitar bulan Oktober atau November, pihak sekolah mulai menyusun rencana anggaran untuk tahun ajaran berikutnya. Waktu ini menyesuaikan dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, agar sekolah memiliki perencanaan yang matang dan terstruktur sebelum tahun anggaran baru dimulai (Fitriani & Junaidi, 2021).

Dalam penyusunannya, bendahara sekolah tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bagian sarana dan prasarana, serta unit lain yang relevan. Proses kolaboratif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan secara menyeluruh dan realistis, mulai dari kebutuhan operasional rutin hingga program-program tahunan. Misalnya, kebutuhan listrik, air, internet, dan pengadaan alat kebersihan dimasukkan sebagai komponen prioritas dalam ARKAS. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip manajemen partisipatif, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara bersama demi tercapainya efisiensi anggaran (Mulyasa, 2013).

ARKAS sebagai sistem digital mempermudah penyusunan anggaran melalui fitur-fitur yang mendukung perencanaan berbasis data. Salah satu fitur utama adalah pemetaan belanja berdasarkan akun rekening yang telah distandarkan oleh pemerintah. Fitur ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan pengeluaran dengan batas-batas penggunaan dana yang diperbolehkan. Selain itu, ARKAS juga mencatat proyeksi jumlah siswa yang sangat penting karena dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Dengan demikian, perencanaan yang akurat menjadi kunci agar alokasi dana tidak mengalami defisit atau kekeliruan (Raharjo, 2021; Hasibuan, 2023).

Namun, ARKAS juga memiliki ketentuan yang cukup ketat terkait perubahan atau pergeseran dana. Dalam satu tahun anggaran, sekolah hanya diperbolehkan melakukan tiga kali perubahan minor yang tidak menyentuh antar rekening belanja, dan satu kali



perubahan besar yang dapat mengubah struktur anggaran lintas rekening, biasanya pada bulan Oktober. Ketentuan ini menuntut sekolah untuk melakukan penyusunan yang sangat cermat sejak awal agar tidak perlu terlalu sering melakukan revisi, yang bisa menghambat fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi di lapangan (Putri, 2022; Arifin, 2020).

Penyusunan melalui ARKAS juga mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rencana dan perubahan harus disetujui oleh kepala sekolah serta dipantau oleh pengawas dari dinas pendidikan. Selain itu, karena berbasis sistem digital terintegrasi, data anggaran sekolah dapat dipantau secara langsung oleh dinas, sehingga potensi manipulasi atau penyimpangan dana dapat diminimalkan. Digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola keuangan sekolah, khususnya dalam pengelolaan dana BOS dan belanja rutin lainnya (Fitriani & Junaidi, 2021; Wijaya & Suparman, 2023).

Dengan adanya sistem ARKAS, proses penyusunan dan penganggaran di SMP IT Insan Cendekia menjadi lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Sekolah memiliki kontrol penuh atas perencanaan yang selaras dengan kebutuhan riil, sekaligus tetap mengikuti koridor regulasi pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengelolaan dana, tetapi juga membangun budaya tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang sangat penting bagi institusi pendidikan swasta yang bergantung pada kombinasi dana BOS, SPP, dan dukungan yayasan.

### **Pengelolaan Dana BOS**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu komponen krusial dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di SMP IT Insan Cendekia. Dana ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin sekolah, seperti pembayaran tagihan listrik, air, internet, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan barang habis pakai lainnya. Menurut bendahara sekolah, penggunaan dana BOS selalu diarahkan pada pengeluaran yang sifatnya wajib dan tidak dapat ditunda. Hal ini sesuai dengan prinsip prioritas kebutuhan dasar dalam manajemen pembiayaan pendidikan (Mulyasa, 2013; Daryanto & Karim, 2017).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS di SMP IT Insan Cendekia dilakukan secara disiplin dan terstruktur. Setiap alokasi dirancang berdasarkan Rencana Kegiatan

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

dan Anggaran Sekolah (RKAS/ARKAS) yang telah disusun sebelumnya dan disesuaikan dengan juknis BOS dari Kemendikbud. Bendahara menjelaskan bahwa semua transaksi dikelompokkan ke dalam kategori rekening belanja sesuai pedoman yang berlaku, seperti belanja barang, jasa, dan barang habis pakai. Penyusunan anggaran ini juga mempertimbangkan kebutuhan tahunan seperti pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS) atau pengadaan alat kebersihan (Suryadi, 2022; Arifin, 2020).

Karena dana BOS di sekolah swasta tidak sebesar yang diterima sekolah negeri, SMP IT Insan Cendekia harus membuat prioritas yang ketat dalam penggunaannya. Misalnya, jika ada kebutuhan pembaruan perangkat komputer dan pada saat bersamaan tagihan listrik jatuh tempo, maka pembayaran tagihan harus didahulukan. Strategi ini digunakan agar operasional sekolah tetap berjalan tanpa gangguan. Hal ini sejalan dengan temuan Raharjo (2021) bahwa sekolah swasta lebih cermat dalam alokasi dana BOS karena harus menutupi kekurangan pendanaan dari sumber lain (Wijaya & Suparman, 2023).

Selain itu, sekolah juga harus berhadapan dengan batasan penggunaan dana BOS berdasarkan regulasi yang ketat. Dana ini, misalnya, tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung atau pembayaran gaji guru tetap yayasan, yang menjadi tanggung jawab pihak yayasan atau dari dana SPP. Untuk menjaga transparansi, setiap pengeluaran dana BOS didukung dengan bukti fisik, seperti kuitansi dan nota, serta dilaporkan secara berkala melalui sistem ARKAS digital. Digitalisasi ini sangat membantu dalam efisiensi pelaporan dan pengawasan oleh dinas pendidikan (Fitriani & Junaidi, 2021; Hasibuan, 2023).

Tantangan terbesar dalam pengelolaan dana BOS di sekolah swasta adalah keterbatasan jumlah dana yang diterima. Berbeda dengan sekolah negeri yang beberapa pengeluaran rutin seperti listrik dan air bisa ditanggung langsung oleh pemerintah, di sekolah swasta semua beban biaya tersebut harus ditanggung sendiri. Kondisi ini mendorong SMP IT Insan Cendekia untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya keuangannya dan melakukan efisiensi di berbagai sektor (Putri, 2022; Santosa, 2020).

### **Sumber Dana Tambahan dan Pemanfaatannya**

Di luar dana BOS, SMP IT Insan Cendekia juga menggali beragam sumber pembiayaan untuk menutupi celah kebutuhan operasional dan program pengembangan

siswa. Sumber utama kedua adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayar orang tua siswa setiap bulan. Berbeda dengan BOS, SPP diarahkan untuk membiayai kegiatan non-rutin, seperti kegiatan keagamaan (mabit), program ekstrakurikuler, dan biaya operasional PTS/penilaian akhir tahun. Dengan demikian, dana SPP berfungsi sebagai penunjang kualitas proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa, bukan sekadar menutup biaya listrik atau ATK. Penelitian Sutisna, Umam, & Morisson (2024) menemukan bahwa alokasi SPP bagi kegiatan pengembangan siswa di sekolah Islam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar peserta didik .

Selain SPP, setiap awal tahun ajaran SMP IT Insan Cendekia mengumpulkan dana registrasi (pendaftaran ulang). Dana ini umumnya digunakan untuk menutup biaya operasional tahunan. Misalnya perawatan gedung, pembaruan perangkat IT, dan peningkatan sarana laboratorium. Karena tidak dibebankan pada BOS, dana registrasi memberi fleksibilitas untuk investasi jangka menengah. Gunawan (2023) menegaskan bahwa diversifikasi pos pendapatan termasuk pendaftaran ulang membantu sekolah swasta menjaga stabilitas keuangan sekaligus membiayai program peningkatan mutu .

Yayasan yang menaungi SMP IT Insan Cendekia juga menjadi sumber dana penting. Yayasan sering kali menyalurkan dana khusus untuk program beasiswa murid berprestasi atau untuk honor guru pembimbing ekstrakurikuler, yang tidak tercakup oleh BOS maupun SPP. Misalnya, pada tahun akademik sebelumnya, yayasan mendanai penuh pelaksanaan lomba sains antar-kabupaten dan program leadership camp. Penelitian Adysti, Cahyaningrum, & Prawesti (2024) menunjukkan bahwa peran yayasan sebagai penyedia dana alternatif efektif meringankan beban operasional sekolah dan mendukung keberlanjutan program unggulan .

### **Mekanisme Transaksi dan Pertanggungjawaban Keuangan**

Mekanisme transaksi keuangan di SMP IT Insan Cendekia dirancang berbasis sistem nontunai atau *cashless*, sebagai upaya meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi keuangan (Susanti & Wulandari, 2021). Semua pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau sistem keuangan digital agar dapat dilacak secara sistematis (Harahap & Safitri, 2022). Sistem ini tidak hanya mengurangi risiko kehilangan dana, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi harian sekolah (Suryana, 2019). Setiap transaksi memerlukan otorisasi dari kepala sekolah yang

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

dilakukan melalui proses verifikasi dua tahap, yaitu persetujuan dokumen dan konfirmasi digital melalui aplikasi pesan instan resmi. Prosedur ini dibuat untuk memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran dan tidak terjadi penyimpangan administratif. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan keuangan utama di sekolah memiliki peran sentral dalam pengawasan transaksi (Fitriani & Junaidi, 2021).

Penutupan Buku Kas Umum (BKU) dilakukan setiap akhir bulan oleh bendahara dengan mencocokkan seluruh data transaksi yang tercatat di ARKAS dengan rekening koran dari bank. Rekonsiliasi ini penting untuk menghindari selisih laporan keuangan yang dapat menimbulkan pertanyaan dari pihak pengawas keuangan sekolah (Susanti & Wulandari, 2021). Apabila terdapat perbedaan data, bendahara akan menelusuri sumber kesalahan secara manual satu per satu hingga ditemukan solusi yang tepat (Sari & Munawaroh, 2022). Sistem ARKAS membantu efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan karena laporan dapat dibuat otomatis berdasarkan data yang sudah masuk dalam sistem (Fitriani & Junaidi, 2021). Dibandingkan dengan metode manual, sistem ini memangkas waktu kerja administratif secara signifikan (Harahap & Safitri, 2022). Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan dinas pendidikan, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan (Daryanto & Karim, 2017).

Namun demikian, laporan keuangan tidak hanya ditujukan kepada dinas pendidikan, tetapi juga kepada seluruh stakeholder sekolah sebagai bentuk akuntabilitas moral (Wijaya & Suparman, 2023). Setiap pembelanjaan dilaporkan secara transparan kepada kepala sekolah dan unit terkait dalam rapat evaluasi bulanan (Suryadi, 2022). Selain sebagai bentuk pelaporan, forum ini juga menjadi tempat validasi antara rencana dan realisasi anggaran (Raharjo, 2021).

Semua penggunaan dana harus mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dalam RAB dan ARKAS untuk menghindari penyalahgunaan anggaran (Hasibuan, 2023). Bahkan perubahan anggaran pun dibatasi dalam jumlah dan waktu pelaksanaannya agar tidak mengganggu sistem pelaporan digital (Sari & Munawaroh, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang digunakan tidak hanya responsif, tetapi juga terstandar dan dikontrol dengan baik (Mulyasa, 2013).

## **Evaluasi dan Kendala Pengelolaan**

Meskipun SMP IT Insan Cendekia telah menerapkan sistem keuangan berbasis digital yang relatif efisien, pengelolaan dana tetap menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah selisih data antara anggaran yang tercatat di ARKAS dan realisasi transaksi pada rekening bank sekolah. Fenomena ini paling sering muncul pada awal tahun anggaran, ketika volume transaksi baru meningkat tajam dan proses input data dalam sistem belum sepenuhnya stabil (Wardhani, Santoso, & Hidayat, 2022).

Pada periode awal 2024, misalnya, hampir seluruh sekolah swasta di wilayah tersebut melaporkan adanya selisih antara laporan keuangan dalam sistem dan saldo di bank, memaksa bendahara melakukan pelaporan khusus ke Dinas Pendidikan setempat. Untuk menemukan akar masalah, bendahara harus menelusuri setiap entri transaksi mulai dari tanggal, nominal, hingga kategori rekening secara manual, menggunakan cetak buku kas dan bukti transfer fisik (Raharjo, 2021). Proses pengecekan satu per satu ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menuntut ketelitian tinggi dan pengetahuan mendalam tentang alur sistem ARKAS serta prosedur perbankan (Mulyasa, 2013).

Selain kesenjangan data, keterbatasan dana BOS menjadi tantangan berikutnya. Dana BOS di sekolah swasta cenderung lebih kecil dibanding sekolah negeri, sehingga tidak semua kebutuhan operasional dapat ditutup sepenuhnya oleh anggaran tersebut (Putri, 2022). Misalnya, biaya listrik dan air yang di sekolah negeri kerap ditanggung pemerintah, di sekolah swasta harus ditutup dari BOS—atau jika tidak mencukupi, dari sumber lain seperti SPP dan dana registrasi (Hasibuan, 2023). Kondisi ini memaksa bendahara untuk proaktif merencanakan “back-up plan” keuangan dengan menjalin komunikasi intensif dengan yayasan pengelola dan panitia komite sekolah untuk menyiapkan dana partisipatif orang tua (Romandoni, Fatimah, & Kurniawan, 2024).

Keterlibatan yayasan dan komite sekolah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga strategis. Mereka membantu menyusun prioritas pengeluaran ketika terjadi kekurangan dana mendadak, seperti perbaikan mendesak jaringan internet atau pengadaan ulang ATK saat persediaan habis (Wardhani et al., 2022). Namun, mekanisme pendanaan partisipatif ini memiliki tantangan tersendiri, di antaranya koordinasi jadwal rapat dengan orang tua yang sibuk dan prosedur administratif pencairan dana yang memerlukan dokumen legal lengkap (Suryadi, 2022).

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

Di sisi SDM, walaupun digitalisasi mengurangi beban administratif manual, tetap diperlukan keterampilan manual untuk mengoreksi dan memverifikasi data apabila terjadi error sistemik atau entri ganda (Syifa, 2025). Bendahara dan staf administrasi harus mendapatkan pelatihan rutin baik dalam penggunaan ARKAS maupun teknis rekonsiliasi bank untuk menjaga kualitas data keuangan (Putri, 2022). Namun, keterbatasan waktu dan anggaran pelatihan sering kali menjadi kendala sehingga kapasitas SDM belum selalu sejalan dengan perkembangan fitur digital (Hasibuan, 2023).

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang meningkatkan efisiensi, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan akan pengelolaan manual yang teliti, perencanaan keuangan alternatif, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Ke depan, perlu dikembangkan prosedur standar operasi (SOP) rekonsiliasi yang lebih ringkas, alokasi anggaran khusus pelatihan, serta perbaikan infrastruktur jaringan agar sistem ARKAS dapat berfungsi optimal sepanjang tahun anggaran.

### **Akuntabilitas dan Kepatuhan terhadap RAB**

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di SMP IT Insan Cendekia dimulai sejak tahap perencanaan dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang detail dan terukur. Setiap rincian pos belanja dalam RAB didefinisikan secara jelas mulai dari kode rekening, uraian kebutuhan, hingga estimasi biaya untuk meminimalkan interpretasi ganda saat pelaksanaan (Arifin, 2020). Seluruh unit kerja wajib mengajukan proposal kegiatan disertai RAB rinci sebelum jabaran anggaran akhir disahkan oleh kepala sekolah. Proses pengesahan RAB dilakukan dalam rapat anggaran yang melibatkan bendahara, kepala sekolah, dan perwakilan bagian sarana prasarana sehingga keputusan bersifat kolektif dan transparan (Suryadi, 2022).

Setelah disetujui, RAB menjadi dokumen acuan mutlak dalam setiap transaksi pengeluaran; setiap pengeluaran yang tidak sesuai dengan RAB harus mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk Berita Acara Perubahan Anggaran (Putri, 2022). Mekanisme perubahan anggaran diatur ketat: hanya tiga kali perubahan minor dan satu kali perubahan besar yang melibatkan pengalihan dana antar rekening dalam satu tahun anggaran (Hasibuan, 2023). Berita Acara Perubahan Anggaran dicatat dalam sistem

ARKAS dan didokumentasikan lengkap bersama lampiran proposal revisi, anggaran awal, dan alasan perubahan (Fitriani & Junaidi, 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan, bendahara melakukan verifikasi kesesuaian antara RAB dan dokumen pendukung transaksi seperti nota, kuitansi, dan invoice sebelum memproses pembayaran (Romandoni, Fatimah, & Kurniawan, 2024). Verifikasi ini memastikan bahwa tidak ada pengeluaran di luar jangkauan RAB dan mencegah potensi fraud atau penyalahgunaan dana (Syifa, 2025). Setiap tiga bulan sekali, kepala sekolah meninjau realisasi anggaran melalui laporan triwulan yang dihasilkan ARKAS, membandingkan antara RAB dan realisasi untuk mengevaluasi kepatuhan dan efisiensi penggunaan dana.

Apabila ditemukan deviasi melebihi 10% pada salah satu pos anggaran, sekolah mengadakan rapat evaluasi internal yang dihadiri wali kelas, tim sarpras, dan komite sekolah untuk merumuskan tindakan korektif (Putri, 2022). Tindakan korektif dapat berupa re-prioritisasi kegiatan, pemangkasan anggaran non-esensial, atau penambahan sumber dana alternatif untuk menutup defisit (Raharjo, 2021). Proses ini didokumentasikan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi, yang disimpan sebagai bagian dari arsip akuntabilitas keuangan sekolah (Suryadi, 2022).

Auditor internal yayasan melakukan audit tahunan terhadap kepatuhan RAB dan prosedur akuntabilitas keuangan, memeriksa kecocokan antara RAB, realisasi di ARKAS, dan bukti transaksi fisik (Romandoni et al., 2024). Hasil audit ini dilaporkan kepada pengurus yayasan dan Dinas Pendidikan sebagai bukti pertanggungjawaban publik, sekaligus bahan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Sekolah juga mempublikasikan ringkasan laporan keuangan dan audit dalam forum rapat orang tua siswa setiap semester, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas moral (Syifa, 2025).

Kepatuhan terhadap RAB tidak hanya dibatasi pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi etika pengelolaan dana setiap penggunaan dana harus berdasar pada kebutuhan riil dan memberikan manfaat edukatif bagi siswa (Daryanto & Karim, 2017). Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi SMP IT Insan Cendekia membangun kepercayaan stakeholders dan menjaga reputasi lembaga. Ke depan, sekolah merencanakan

# **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA**

implementasi modul pelatihan rutin bagi seluruh staf administrasi terkait kepatuhan RAB dan peningkatan kompetensi audit internal untuk memperkuat budaya akuntabilitas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan di SMP IT Insan Cendekia telah dilakukan secara terstruktur, akuntabel, dan berbasis digital melalui sistem ARKAS. Perencanaan anggaran dilakukan secara kolaboratif dan disusun berdasarkan kebutuhan riil operasional sekolah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi. Pengelolaan dana BOS diarahkan pada pembiayaan kebutuhan dasar dan rutin sekolah, sementara kebutuhan program pengembangan serta kegiatan non-rutin didukung oleh dana tambahan seperti SPP, dana registrasi, dan bantuan yayasan. Mekanisme pelaporan keuangan dilakukan secara berkala dan akurat melalui sistem nontunai, serta didukung oleh verifikasi dan audit internal. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa selisih data antara sistem dan rekening bank, keterbatasan dana BOS, serta kapasitas SDM dalam penguasaan digital dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar sekolah mengembangkan prosedur standar operasional (SOP) rekonsiliasi keuangan yang lebih ringkas dan adaptif terhadap kendala teknis. Selain itu, pelatihan berkala untuk staf administrasi perlu diprioritaskan guna meningkatkan kapasitas dalam penggunaan sistem digital keuangan seperti ARKAS. Pihak yayasan dan komite sekolah juga diharapkan memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung stabilitas pendanaan, terutama dalam situasi darurat operasional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif dengan sekolah swasta lainnya untuk memperluas generalisasi temuan serta mengeksplorasi peran stakeholder eksternal dalam penguatan akuntabilitas pembiayaan pendidikan.

## **DAFTAR REFERENSI**

Adysti, R. N., Cahyaningrum, S. D., & Prawesti, D. A. (2024). “Strategi diversifikasi sumber dana dalam peningkatan efisiensi keuangan di SMP IT Utsman Bin Affan Surabaya”. *Cendekia Pendidikan*, 3(1), 90–103.



- Anggina, L., Kurniati, M., & Pebriani, A. R. (2024). Pengelolaan Manajemen Keuangan: Prioritas, Evaluasi Dan Akuntabilitas Di Sman 9 Bandung. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 201-213. <https://doi.org/10.58192/populer.v3i4.2817>
- Arifin, M. (2020). *Pengelolaan dana BOS berbasis akuntabilitas publik di sekolah swasta*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 8(2), 113–124.
- Attaqi, A. F. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMAN 8 Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, JAKARTA= FITK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA).
- Banding, M. P. (2024). *Meningkatkan Kinerja Sekolah Melalui Dana Bos: Analisis Efektivitas*. Mega Press Nusantara.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Institution Press.
- Daryanto, & Karim, S. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Gava Media.
- Fitriani, A., & Junaidi, R. (2021). Digitalisasi sistem pelaporan dana BOS dan dampaknya terhadap efisiensi pengelolaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 90–98.
- Gunawan, S. D. (2023). Digitalisasi metode pembayaran SPP berbasis non-tunai terhadap efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan. Tesis Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Harahap, R., & Safitri, T. (2022). *Transformasi manajemen keuangan sekolah berbasis digital*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 10(1), 45–56.
- Hasibuan, A. (2023). Efektivitas ARKAS dalam transparansi keuangan sekolah dasar. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 11(1), 35–42.
- Hidayat, A., Fadhilah, E. D. N., Mumtaz, H. N., & Zahroh, I. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Tahfizhul Qur'an Amanah Ummah Arcamanik Kota Bandung. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 100-112. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1301>
- Kemendikdasmen. (2025). *Kasus penyimpangan dana BOS di berbagai daerah jadi perhatian pemerintah pusat*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Larasanti, J., Wicaksono, L., & Salam, U. (2025). PENTINGNYA STRATEGI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 BANYUKE HULU). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 677-686. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.23664>

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI SMP IT INSAN CENDEKIA

- Maknun, A. L., Fatin, N., & Prayogo, M. W. (2025). EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEUKU UMAR SEMARANG. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/bb230b40>
- Matraji, U. (2024). *Sekolah swasta bisa gulung tikar jika BOS diwajibkan untuk makan siang siswa*. CNN Indonesia.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Mustabsyirah, M., & Mardyawati, M. (2024). Strategi efektif dalam pengelolaan dana sekolah yang inspiratif dan berkelanjutan di UPTD SMP Negeri 37 Sinjai. *Jurnal Studi Edukasi Integratif*, 1(3), 151-160.
- Prihanarko, A., & Hidayati, D. (2023). Pemanfaatan Sistem Informasi Pada Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Manajemen Pendidikan*, 18(1). DOI: [10.23917/jmp.v18i1.21316](https://doi.org/10.23917/jmp.v18i1.21316)
- Putri, D. F. (2022). Tantangan pengelolaan dana BOS di sekolah swasta: Studi kasus di Bandung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pendidikan*, 6(3), 213–221.
- Raharjo, S. (2021). Efektivitas penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 9(1), 77–86.
- Romandoni, D., Fatimah, S., & Kurniawan, M. (2024). *Audit internal dan prosedur verifikasi dalam meningkatkan integritas data keuangan sekolah swasta*. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 10(3), 120–131.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (2018). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 182-204). Routledge. <https://doi.org/10.2307/975901>.
- Santosa, H. (2020). Strategi efisiensi keuangan di sekolah swasta berbasis syariah. *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, 7(2), 102–114.
- Sari, A., & Munawaroh, R. (2022). *Rekonsiliasi laporan keuangan sekolah dan tantangannya*. *Jurnal Keuangan Daerah dan Pendidikan*, 7(2), 112–119.
- Setiawan, H., & Miharja, M. (2025). Analisis Penggunaan Dana BOS Di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta Terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. *HUMANIORUM*, 3(1), 32-37. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.58>

- Sianturi, et al. (2024). *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Teknik*. Edu Publisher.
- Suryadi, A. (2022). Implementasi sistem pengelolaan dana BOS berbasis digital di SMP Islam. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 4(2), 67–78.
- Suryana, Y. (2019). *Sistem pengawasan internal pada sekolah swasta berbasis digitalisasi*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 56–63.
- Susanti, D., & Wulandari, E. (2021). *Penerapan sistem cashless dalam pengelolaan keuangan sekolah*. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 4(3), 134–142.
- Sutisna, U., Umam, R. A., & Morisson, B. (2024). “Optimalisasi sumber daya dalam pembiayaan pendidikan SMA swasta: studi tentang diversifikasi pendanaan”. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 11(6), 110–120.
- Syifa, F. N. (2025). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan fleksibilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS dengan ARKAS sebagai variabel moderasi (Studi empiris SD/SMP Batam)*. *Zona Keuangan*, 14(2).
- Syukri, M., Melisawati, S., Fatma, D., & Renanda, R. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 605-617. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13932587>
- Tenri, A., et al. (2025). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pendidikan*, 13(1), 28-39.
- Waldo, D. (2017). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. Routledge.
- Waluyo, T. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28-37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Wardhani, L., Santoso, B., & Hidayat, R. (2022). *Sistem pemantauan stok dan tabungan kelas dalam mendukung efisiensi pengeluaran sekolah dasar*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45–57.
- Wijaya, Y., & Suparman, A. (2023). Perbandingan alokasi dana BOS antara sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 10(2), 144–155.
- Wulandari, T. (2023). *Masalah teknis dan literasi digital hambat pemanfaatan ARKAS di sekolah*. Kompas.

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM  
MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI  
SMP IT INSAN CENDEKIA**

Yudianto, U. C. B., et al. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Overview  
Implementasi Pembiayaan Pendidikan Di Satuan-Satuan Pendidikan.